

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakuannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memunculkan paradigma tersendiri dalam dunia pendidikan. Dimana kepala daerah telah diberi kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional telah mengkaji beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah menjamin pendidikan melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan lebih fungsional, baik bagi

individu maupun masyarakat, diperlukan keterlibatan para tokoh masyarakat, di samping para ahli untuk merancang isi kurikulum dan jenis kegiatan-kegiatan pembelajarannya.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi penuh yang ditempuh oleh masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah di berbagai aspek juga akan meningkat. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah adalah tanggung jawab dalam manajemen pendidikan.

Dengan otonomi daerah diharaplan agar jangan menumbuhkan beban baru pada masyarakat, akan tetapi bagaimana agar masyarakat merasa lebih sejahtera, lebih aman, lebih damai, lebih diperhatikan dan berbagai macam kelebihan lain dibanding sebelumnya, terlebih di dalam dunia pendidikan. Dalam otonomi tersebut kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Akankah pemerintah memperhatikan sektor ini, semua itu tergantung dari pimpinan daerah masing-masing. Pimpinan daerah yang mempunyai misi kedepan sangat di harapkan dalam kemajuan dunia pendidikan.

Mengingat pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai prasyarat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang demokratis, pendidikan yang berkualitas tidak hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik tetapi perlu dikembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kebudayaan.

Selama ini pengelolaan terhadap sektor pendidikan terlalu kaku dan sentralistik, sehingga banyak program tidak banyak memberikan dampak

positif, angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun. Diduga hal tersebut erat kaitannya dengan masalah manajemen.

Dalam kaitan ini muncullah salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Kondisi nyata tersebut dalam memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Untuk terciptanya suatu sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan (Anonim, 2002). Dengan MBS unsur pokok sekolah (*constituent*) memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga nonstruktural yang disebut dewan sekolah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrator, orang tua, anggota masyarakat, dan murid (Nurkolis, 2008:42).

Pemberian otonomi pendidikan menurut pendekatan manajemen akan lebih kondusif di sekolah karena dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif. Bentuk otonomi pendidikan secara nyata bisa berupa partisipasi masyarakat dalam usaha mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah untuk

menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah.

Komite Sekolah adalah badan mandiri sebagai tempat peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, maka Komite Sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Salah satu peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam kebijakan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil pendidikan, komite sekolah harus mampu memberikan masukan-masukan dan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan sekolah. Hal-hal yang sering kali harus dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas

pendidikan di sekolah antara lain kurikulum dan program pengajaran. Hal ini perlu diperhatikan agar kemampuan dan ketrampilan peserta didik relevan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan, perlu adanya suatu manajemen kurikulum dan program pengajaran yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Selain itu juga diharapkan dengan manajemen kurikulum dan program pengajaran, mampu mengembangkan program pendidikan tertentu yang sesuai dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya karena pendidikan yang didapat di bangku sekolah nantinya akan diterapkan langsung dalam kehidupannya. Jadi sebisa mungkin kurikulum dan program pengajaran selalu disesuaikan dengan keadaan dan situasi lingkungan saat ini.

Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran. Manajemen atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu manajemen tenaga pendidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Salah satu syarat yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal adalah dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan yang dimaksud adalah peralatan dan

perlengkapan yang secara langsung atau pun tidak langsung yang dipergunakan di dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, laboratorium baik bahasa, IPA maupun multimedia serta alat-alat dan media pengajaran lainnya.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam lembaga pendidikan selalu ada komponen-komponen yang menentukan keberhasilan suatu lembaga. Komponen ini meliputi komponen siswa, guru, kurikulum, maupun komponen sarana dan prasarana.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang juga sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Semua ini tentunya tidak bisa di lepaskan dari keuangan.

Keuangan merupakan hal yang sangat pokok, dimana segala sesuatu tidak akan bisa berjalan tanpa ada biaya. Betapa pun bagus sebuah program yang di buat baik bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta humas tidak akan dapat diwujudkan tanpa dukungan biaya. Untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah hanya mengandalkan guru atau pun kepala sekolah saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini bisa dilakukan melalui Komite sekolah yang mempunyai fungsi sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan sebagai *mediator*.

Beberapa fakta tentang Komite Sekolah:

1. Di sebagian daerah, sosialisasi tentang peran komite sekolah kepada masyarakat belum efektif
2. Di beberapa sekolah, komite sekolah hanya berperan sebagai alat kelengkapan sekolah
3. Sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpul dana untuk membiayai program sekolah
4. Tugas pokok dan fungsi komite sekolah belum dilaksanakan secara optimal
5. Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi komite sekolah belum berimbang (Haryadi, dkk 2006:52).

Permasalahan di atas perlu mendapat perhatian agar sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apakah permasalahan di atas terjadi juga di SMP N 2 Ambarawa?. Semua ini tergantung dari *stake holders* sekolah ini. Permasalahan yang harus segera mendapat perhatian adalah bagaimana sekolah bisa menjalin hubungan dengan masyarakat.

Permasalahan dalam hubungannya dengan masyarakat adalah apabila tidak adanya komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Dengan

komunikasi yang baik akan didapat informasi yang jelas. Dan dengan informasi yang jelas permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Kurangnya informasi dari sekolah akan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas gambaran yang terjadi di sekolah tersebut sehingga hubungan antara keduanya tidak dapat berjalan secara harmonis. Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan sekolah dan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka peran dalam penentuan kebijakan sekolah harus benar-benar dijalankan oleh sebuah badan atau lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur sekolah, yang kemudian lembaga ini diistilahkan sebagai komite sekolah. Peran komite sekolah sangatlah penting dalam menangani berbagai permasalahan-permasalahan tersebut.

Komite sekolah SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang sebagai perwujudan dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah mempunyai peranan yang cukup besar dalam kebijakan sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas dan keuangan di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Program-program yang diajukan oleh pihak sekolah, komite sekolah mempunyai wewenang untuk melaksanakan perannya yang dilakukan dalam rapat-rapat dalam menyusun anggaran, penyusunan program kerja dan melakukan pengalangan dana. Wujud kewenangan komite disini

berupa sarana atau pertimbangan dalam penentuan dan perencanaan program, memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan program, dan melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan program kebijakan.

Komite sekolah di SMP Negeri 2 Ambarawa berupaya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat baik perorangan/organisasi maupun dunia usaha dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian komite menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Disini komite memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Komite sekolah juga berupaya mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Misalnya dengan melakukan penggalangan dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Begitu gigihnya kerja komite sekolah sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat kecamatan Ambarawa khususnya dan masyarakat kabupaten Semarang pada umumnya. SMP Negeri 2 menjadi

sekolah yang mengharumkan nama kecamatan Ambarawa dengan berbagai prestasi yang telah di raih dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Mulai dari berbagai lomba di tingkat kecamatan sampai di tingkat nasional hampir setiap tahun tidak pernah ada yang lowong. Ini terjadi karena kerjasama dari berbagai pihak mulai dari siswa, orang tua wali siswa, guru, pegawai, kepala sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini adalah komite sekolah yang terjalin dengan begitu baik.

Peran komite sekolah yang begitu penting di dalam menjalankan tugasnya diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, kiranya tepat jika dilakukan penelitian dengan judul ***“Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Sekolah : Studi Situs SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?

Adapun fokus penelitian ini dapat dijabarkan dalam sub fokus sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kurikulum di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kesiswaan di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?

3. Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang sarana dan prasarana di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?
4. Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang hubungan sekolah dengan masyarakat di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?
5. Bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang keuangan di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan cermat terhadap karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.

Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan cermat terhadap.

1. Karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kurikulum di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.
2. Karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kesiswaan di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.
3. Karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang sarana dan prasarana di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.

4. Karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang hubungan sekolah dengan masyarakat di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.
5. Karakteristik peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang keuangan di SMPN 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Proses dan hasil penelitian ini dapat merupakan pengembangan penelitian komite sekolah yang mempunyai peran dan fungsi meningkatkan keikutsertaan masyarakat, khususnya peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bahan masukan kepada dewan pendidikan dalam rangka pembinaan terhadap Komite Sekolah berkaitan dengan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di satuan pendidikan.
- 2) Bahan masukan kepada kepala sekolah dalam rangka peningkatan fungsi manajemen berkaitan dengan kerjasamanya dengan komite sekolah.

E. Daftar Istilah

Istilah yang muncul dalam penelitian ini adalah.

1. Komite sekolah adalah badan mandiri sebagai tempat peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Kebijakan sekolah merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis sekolah yang dijabarkan dari visi, misi sekolah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan sekolah untuk kurun waktu tertentu.